

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, Januari 2024

CAMAT KUTOREJO



NURYADI, SH.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP.19700820 199201 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Stuktur Organisasi	5
1.4. Isu Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian	9
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1. Umum	11
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.3. Program	12
2.4. Rencana Strategis	13
2.5. Rencana Kerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran	36
3.3. Tindaklanjut dan Evaluasi	38
BAB IV Penutup	40
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Kutorejo 2021-2026	
2. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2023	
3. IKU Kecamatan Kutorejo	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
6. Struktur Organisasi	
7. Laporan Kinerja JFU	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo tahun 2022 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Ada satu (satu) Sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan indicator kinerja IKM Kecamatan dan ada empat (empat) kinerja lainnya yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Ada 3 Indikator Kinerja yaitu :
 - 3.1. Nilai SAKIP Kecamatan
 - 3.2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 - 3.3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Kutorejo menjalankan 3 Program , 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.929.868.777,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 2.867.019.991,00 atau mencapai 97,85% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 85 terealisasi 90,35 sehingga capaian kinerjanya adalah 106,29%.

Pada kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Indikator Kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 81 terealisasi 80,86 capaian kinerjanya adalah 99,82%, Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 95% terealisasi 97,85% capaian kinerjanya adalah 103%, Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 77 terealisasi 77,99 capaian kinerjanya adalah 101%.

Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, pada Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 3 inovasi terealisasi 3 inovasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto No. 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyampaian LKjIP Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Kutorejo dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kutorejo berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km² yang terdiri dari 2.660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan.

Pada Kecamatan Kutorejo terdapat sentra produksi yang etrletak pada desa-desa se kecamatan Kutorejo yaitu :

- Batu Bata Merah (Desa Kaligiri, Desa Kepuhpandak dan Desa Karangasem)
- Genting (Desa Kaligiri dan Desa Karangasem O)
- Pigora (Desa Jiyu, Desa Pesanggrahan, Deda Windurejo dan Desa Kertosari)
- Jajanan Rambut Nenek, Jipang dan Pop Cron (Desa Simbaringin)
- Krupuk Ikan Tengiri (Desa Gedangan, Desa Kepuharum, Desa Windurejo, Desa Pesanggrahan dan Desa Jiyu)
- Bakpia (Desa Singowangi)
- Ojek / Opak Jepit Kacang (Desa Wonodadi)

Wilayah Kecamatan Kutorejo terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Kutorejo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Kutorejo

Secara administratif Kecamatan Kutorejo terdiri dari 17 Desa , 108 Dusun , 358 RT serta jumlah penduduk sebesar 67.380 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kutorejo (Per Juni 2023)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Payungrejo	1.499	1.397	2.896
2	Simbaringin	1.930	1.910	3.840
3	Sampangagung	2.391	2.309	4.700
4	Jiyu	2.179	2.163	4.342
5	Pesanggrahan	2.868	2.770	5.638
6	Windurejo	2.002	1.977	3.979
7	Kertosari	1.664	1.588	3.252
8	Kutorejo	1.662	1.700	3.362
9	Kepuharum	1.332	1.274	2.606
10	Gedangan	1.713	1.610	3.323
11	Karangdiyeng	2.406	2.293	4.699
12	Sawo	2.915	2.795	5.710
13	Singowangi	1.929	1.952	3.881
14	Wonodadi	1.746	1.698	3.444
15	Kepuh pandak	2.496	2.428	4.924
16	Karangasem	1.178	1.149	2.327
17	Kaligoro	2.195	2.262	4.457
TOTAL		34.105	33.275	67.380

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

1.2.1 Kedudukan

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Kutorejo mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.2 Fungsi

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan

9. Seksi Pelayanan

10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.
- h. Pelaksana

1.4 Isu Strategis

Kecamatan Kutorejo sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kutorejo diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kutorejo.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kutorejo.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi

3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kutorejo dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Kutorejo yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Kutorejo menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Kutorejo dan menjadikan Kutorejo sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Kutorejo termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.

3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Kutorejo ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kutorejo yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Kutorejo.
2. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode

1.5 Cascading Kinerja

CASCADING KECAMATAN KUTOREJO 2023																				
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																				
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																				
TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal																				
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan																				
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal																				
IKM Kecamatan																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA														PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Nilai SAKIP Perangkat Daerah														Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran						Persentase pengediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana sesuai target		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kearsadan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kearsadan Perorangan Dinas atau Kearsadan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kutorejo selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja
- E. Peta Proses Bisnis
- F. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan / Ikhtisar Renstra , Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran,

Pada BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rekapitulasi Data informasi pengukuran Tingkat PD
- D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran kinerja PK pejabat sampai dengan tingkat eselon IV/setara
- E. Peta Proses Bisnis (Lengkap)
- F. Cascading (Lengkap)
- G. Prestasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. UMUM

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Kecamatan Kutorejo sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS , AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Kutorejo sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021 – 2026. Dalam mengawal melakukan *action* yang lebih

terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Kutorejo memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Kutorejo, ada 2 sasaran yaitu :

- 1. “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan ”**
- 2. “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ”**

2.3 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outacame hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran dan kinerja lainnya yang dimiliki, yaitu :

- a. Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan “
 - ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah

b. Sasaran 2 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikatornya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikatornya adalah Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

2.4. Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang . Secara Garis besar Renstra Kecamatan Kutorejo memuat tujuan , sasaran , Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pada Renstra 2021-2026

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
SASARAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek Peningkatan ASN yang dilaksanakan
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik
SASARAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

2.5. Rencana Kerja

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif (Rp.)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	RANKHIR RKPD 2023	BERTAMBAH / BERKURANG		
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN								
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,56	80,86 (A)	2.794.625.000	2.639.060.677	155.564.323		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	82%	82%	15.000.000	15.000.000	0		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	21 Laporan	7.060.000	7.060.000	0		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82%	82%	2.291.625.000	2.149.717.000	141.908.000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bula n	18 Orang/Bula n	2.291.625.000	2.149.717.000	141.908.000		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	72	77	20.000.000	18.236.000	1.764.000		
7	1	1	2.05	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20.000.000	18.236.000	1.764.000		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	239.000.000	223.346.027	15.653.973		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	10.000.000	9.995.000	5.000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	6 Paket	80.000.000	56.392.000	133.000		

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	35.643.500	4.356.500
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 Paket	15.000.000	12.769.027	2.230.973
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2.975.000	25.000
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 paket	40.000.000	40.000.000	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	44.000.00	7.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	129.000.000	129.000.000	0
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	39.600.000	39.600.000	0
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	24 laporan	89.400.000	89.400.000	0
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	82%	100.000.000	103.761.650	3.761.650
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	1 Unit	35.000.000	34.494.400	505.600
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3 unit	55.000.000	59.437.250	4.437.250
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 unit	10.000.000	9.830.000	170.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	82%	30.000.000	22.314.500	7.685.500

7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	605 pelayanan	30.000.000	22.314.500	7.685.500
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	30.000.000	22.314.500	7.685.500
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	299.800.000	260.593.600	39.206.400
7	1	6	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 Fasilitasi	29 Fasilitasi	299.800.000	260.593.600	39.206.400
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	41.763.600	8.236.400
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	25.060.000	4.940.000
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	62.800.000	56.900.000	5.900.000
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	11 Dokumen	157.000.000,00	138.870.000,00	20.130.000
TOTAL									2.974.950.000	2.732.000.000	242.950.000

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo pada tahun 2023 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2023, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2023 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	67
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,98
		Rata-rata capaian indikator program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan, target 82 % 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti, target 82 %	82%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90%
		Indeks profesionalitas ASN	72
2	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	82
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.794.625.000,00	APBD 2023
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 30.000.000,00	APBD 2023
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 299.800.000,00	APBD 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan perubahan secara format ada pemisahan antara sasaran strategis dan kinerja lainnya yang dibebankan kepada Kepala Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan format sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	85

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabilitas	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	77
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.646.960.677,00	P APBD 2023
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 22.314.500,00	P APBD 2023
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 260.593.600,00	P APBD 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM	80	81	3.292.922.261	81,25	3.523.426.819	81,50	3.770.066.697	81,75	4.033.971.365	82	4.316.349.361	82	18.936.736.503	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorajo
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan			Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	81,25	3.288.026.819	81,50	3.518.188.697	81,50	3.764.461.905	82	4.027.974.239	82	17.671.573.921	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorajo
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	81,25	3.288.026.819	81,50	3.518.188.697	81,50	3.764.461.905	82	4.027.974.238	82	17.671.573.919	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorajo
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	10 dokumen	13 dokumen	12.000.000	13 dokumen	12.840.000	13 dokumen	13.738.800	13 dokumen	14.700.516	13 dokumen	15.729.552	65 dokumen	69.008.868	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorajo
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	10 dokumen	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	6.420.000	7 dokumen	6.869.400	7 dokumen	7.350.258	7 dokumen	7.864.776	35 dokumen	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	N/A	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	6.420.000	6 dokumen	6.869.400	6 dokumen	7.350.258	6 dokumen	7.864.776	30 dokumen	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	N/A	66 dokumen	2.699.922.261	66 dokumen	2.888.916.819	66 dokumen	3.091.140.997	66 dokumen	3.307.520.866	66 dokumen	3.539.047.327	330 dokumen/laporan	15.526.548.270	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorajo
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Dokumen	2.676.922.261	28 Dokumen	2.864.306.819	28 Dokumen	3.064.808.297	28 Dokumen	3.279.344.877	28 Dokumen	3.508.899.019	140 dokumen	15.394.281.273	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	N/A	38 laporan	23.000.000	38 laporan	24.610.000	38 laporan	26.332.700	38 laporan	28.175.989	38 laporan	30.148.308	190 laporan	132.266.997	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	N/A	27 stel	11.000.000	27 stel	11.770.000	27 stel	12.593.900	27 stel	13.475.473	27 stel	14.418.756	135 stel	63.258.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	N/A	27 stel	11.000.000	27 stel	11.770.000	27 stel	12.593.900	27 stel	13.475.473	27 stel	14.418.756	135 stel	63.258.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80	81	155.000.000	82	165.850.000	83	177.459.500	84	189.881.665	85	203.173.381	85	891.364.546	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	7.000.000	1 paket	7.490.000	1 paket	8.014.300	1 paket	8.575.301	1 paket	9.175.572	5 paket	40.255.173	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	80.000.000	1 paket	85.600.000	1 paket	91.592.000	1 paket	98.003.440	1 paket	104.863.681	5 paket	460.059.121	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	26.750.000	12 bulan	28.622.500	12 bulan	30.626.075	12 bulan	32.769.900	60 bulan	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	2 paket	10.000.000	2 paket	10.700.000	2 paket	11.449.000	2 paket	12.250.430	2 paket	13.107.960	10 paket	57.507.390	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	N / A	1 paket	3.000.000	1 paket	3.210.000	1 paket	3.434.700	1 paket	3.675.129	1 paket	3.932.388	5 paket	17.252.217	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	16.050.000	1 paket	17.173.500	1 paket	18.375.645	1 paket	19.661.940	5 paket	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.050.000	12 bulan	17.173.500	12 bulan	18.375.645	12 bulan	19.661.940	60 bulan	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

			dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD															
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	80	81	121.0 22.40 0	81,25	129.4 93.96 8	81,50	138.5 58.54 6	81,75	148.2 57.64 4	82	158.6 35.67 9	82	695.9 68.23 6	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	36.000 .000	12 bulan	38.520 .000	12 bulan	41.216 .400	12 bulan	44.101 .548	12 bulan	47.188 .656	60 bulan	207.02 6.604	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	N / A	5 THL	85.022 .400	5 THL	90.973 .968	5 THL	97.342 .146	5 THL	104.15 6.096	5 THL	111.44 7.023	25 THL	488.94 1.632	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	80	81	73.97 7.600	81,25	79.15 6.032	81,50	84.69 6.954	81,75	90.62 5.741	82	96.96 9.543	82	425.4 25.87 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	2 unit	30.000 .000	2 unit	32.100 .000	2 unit	34.347 .000	2 unit	36.751 .290	2 unit	39.323 .880	10 unit	172.52 2.170	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	35.977 .600	3 unit	38.496 .032	3 unit	41.190 .754	3 unit	44.074 .107	3 unit	47.159 .295	15 unit	206.89 7.788	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	8.000. 000	1 paket	8.560. 000	1 paket	9.159. 200	1 paket	9.800. 344	1 paket	10.486 .368	5 paket	46.005 .912	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	7.01.02		IKM Kecamatan	81	81	220.000.000	81,25	235.400.000	81,50	251.878.000	81,75	269.509.460	82	288.375.122	82	1.265.162.582	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81	81	20.000.000	81,25	21.400.000	81,50	22.898.000	81,75	24.500.860	82	26.215.920	82	115.014.780	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	605 pelayanan	20.000.000	605 pelayanan	21.400.000	605 pelayanan	22.898.000	605 pelayanan	24.500.860	605 pelayanan	26.215.920	4.025 pelayanan	115.014.780	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	N / A	5 pelayanan	5.000.000	5 pelayanan	5.350.000	5 pelayanan	5.724.500	5 pelayanan	6.125.215	5 pelayanan	6.553.980	25 pelayanan	28.753.695	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	600 pelayanan	15.000.000	600 pelayanan	16.050.000	600 pelayanan	17.173.500	600 pelayanan	18.375.645	600 pelayanan	19.661.940	3.000 pelayanan	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat	81	81	200.000.000	81,25	214.000.000	81,50	228.980.000	81,75	245.008.600	82	262.159.202	82	1.150.147.802	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan	81	17 fasilitasi	200.000.000	17 fasilitasi	214.000.000	17 fasilitasi	228.980.000	17 fasilitasi	245.008.600	17 fasilitasi	262.159.202	85 fasilitasi	1.150.147.802	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

			Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat															
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 jenis	17 fasilitasi	40.000.000	17 fasilitasi	42.800.000	17 fasilitasi	45.796.000	17 fasilitasi	49.001.720	17 fasilitasi	52.431.840	85 fasilitasi	230.029.560	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 jenis	17 fasilitasi	25.000.000	17 fasilitasi	26.750.000	17 fasilitasi	28.622.500	17 fasilitasi	30.626.075	17 fasilitasi	32.769.900	85 fasilitasi	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 jenis	17 fasilitasi	35.000.000	17 fasilitasi	37.450.000	17 fasilitasi	40.071.500	17 fasilitasi	42.876.505	17 fasilitasi	45.877.860	85 fasilitasi	201.275.865	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 jenis	17 fasilitasi	100.000.000	17 fasilitasi	107.000.000	17 fasilitasi	114.490.000	17 fasilitasi	122.504.300	17 fasilitasi	131.079.601	85 fasilitasi	575.073.901	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2023 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	90,35	106,29%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100%	100%

2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,86	99,82%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	97,85%	103%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	77	77,99	101%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Kutorejo untuk tahun 2023 ada yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- ❖ Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.
Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target kinerja 85 terealisasi 90,35 maka Capaian Kinerjanya adalah 106,29 %
- ❖ Kinerja Lainnya 1 Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
Indikator Kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target kinerja nilai 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- ❖ Kinerja Lainnya 2 Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan.
Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja nilai 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- ❖ Kinerja Lainnya 3 Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

- Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja nilai 81 terealisasi 80,86 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,82 %
- Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja nilai 95% terealisasi 97,85% sehingga capaian kinerjanya adalah 103 %
- Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja nilai 77 terealisasi 77,99% sehingga capaian kinerjanya adalah 101 %
- ❖ Kinerja Lainnya 4 Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan
 - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 3 Inovasi terelaisasi 3 Inovasi sehingga capaian kinerja 100 %. Inovasi yang dibuat Kecamatan Kutorejo adalah “SIBAPERAN” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 26 tahun 2021 tentang Inovasi Sinau Bareng Masyarakat dan Perangkat Desa Se Kecamatan Kutorejo kemudian Inovasi yang ke dua yaitu “SIASAT PANDU” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 189.1 tahun 2021 tentang Inovasi Penerapan Sosial Media Sebagai Alat Pengaduan Terpadu dan “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Inovasi “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2022.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	82,99	90,35	109%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	99,04%	100%	101%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	98,53%	100%	101%

3	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	81	81,99	80,86	98%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	98,09 %	97,85%	99%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	77	44,47	77,99	175%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	2 Inovasi	3 Inovasi	150%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Kutorejo di beberapa indikator kinerja tergolong baik dari tahun sebelumnya, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan. Pada sasaran 1 (Tewujudnya pelayanan publik yang optimal) capaian kinerja mengalami keberhasilan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi 90,35 dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 82,99. Pada sasaran 2 (Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan) capaian kinerja mengalami keberhasilan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi 100% dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 99,04%. Pada sasaran 3 (Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan) capaian kinerja mengalami keberhasilan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi 100% dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 98,53%. Sasaran 4 (Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel) capaian kinerja untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan mengalami kegagalan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2023 lebih rendah 80,86 dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 81,99, sedangkan pada indikator Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah telah mengalami keberhasilan dikarenakan capaian realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi 97,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,09 %, pada indicator Indeks Profesionalitas ASN telah mengalami keberhasilan dikarenakan capaian realisasi kinerja tahun 2023 lebih tinggi 77,99 dibandingkan tahun 2022 sebesar 44,47. Sasaran 5 (Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah) dikarenakan pada tahun 2023 inovasi kecamatan bertambah 1 inovasi, sehingga Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan menjadi 3.

3.1.3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir diRENSTRA

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2023)	Tingkat Kemajuan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	90,35	106%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2023)	Tingkat Kemajuan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		85%	100%	117%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		85%	100%	117%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	83,95	80,86	96%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	97,85%	115%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	75	77,99	104%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		-	3 Inovasi	0

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (2023)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,35	-	

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (2023)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	-	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	80,86	-	
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,85%	-	
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	77,99	-	
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	-	

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

1. Sasaran “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Pada indikator kinerja Nilai IKM , terdapat target 85 dengan terealisasi 90,35.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Kutorejo dengan cara melakukan survei menggunakan aplikasi Sukma-E Jatim yang ditampilkan menggunakan QR Code, sehingga nilai tersebut didapat dengan perhitungan Aplikasi Sukma-E Jatim (<https://sukma.jatimprov.go.id/login>). Dengan memberikan penilaian Persepsi terhadap 9 Unsur Pelayanan yaitu : Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi

Pelayanan, Kompetensi Pelaksanan, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan / Saran / Masukan dan Sarana Prasarana.

Untuk memperoleh Nilai SKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 1 : TABEL INTERVAL NILAI SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 adalah 90,35 dan masuk dalam kategori A “ **SANGAT BAIK**”.

- Kinerja Lainnya ke 2 yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.

Seluruh Pelayanan yang masuk di Kecamatan Kutorejo semua terlayani sesuai standart pelayanan. Indikator kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan, target 100% terealisasi 100%. Dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan}}{\text{Keseluruhan jumlah pelayanan}} \times 100\% = \frac{4.874}{4.874} \times 100\% = 100\%$$

- Kinerja Lainnya ke 2 “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan”.

Indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti , terdapat target 100% terealisasi 100%. Dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Keseluruhan jumlah koordinasi}} \times 100\% = \frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti dari program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 7 fasilitasi antara lain :

- Asistensi Penyusunan LPJ
- Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
- Asistensi Penatausahaan Aset
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se Kecamatan Kutorejo
- Asistensi Penyusunan APBDes dan PAPBDes
- Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Desa
- Koordinasi dan Konsultasi Bidang Bidang Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 5 fasilitasi antara lain :

- Pra Musrenbang
- Musrenbang
- Bimtek IDM
- Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Desa
- Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 5 fasilitasi antara lain :

- Tim Forkopimca
- Peningkatan Kapasitas Linmas Desa dan Kecamatan
- Hari Besar Kemerdekaan RI
- Pemantauan dan Pengamanan Wilayah
- Sosialisasi Tanggap Bencana

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 11 fasilitasi antara lain :

- FKUB
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas
- Pleno PKK
- FKDS
- Belanja Hewan Qurban
- Keagamaan / Pengajian
- Forum Anak

- Bimtek SIKS-NG
- Karangtaruna
- Asistensi SIP
- Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kemasyarakatan

4. Kinerja Lainnya ke 3 “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

Ada 3 Indikator Kinerja yang terdapat dalam kinerja lainnya 3 , yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan

Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo, dengan target 81 terealisasi **80,86** sehingga diperoleh capaian kinerja 99,82%.

Realisasi Nilai SAKIP tidak sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan ketidak selarasan antara dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo masuk dalam kategori “ A” dengan interprestasi “ Memuaskan “ , Terdapat gambaran bahwa Kecamatan Kutorejo dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub coordinator.

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pengelolaan anggaran yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 95 % terealisasi 97,85 % sehingga diperoleh capaian kinerja 103%.

Anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.929.868.777,00 Realisasi Anggaran Rp. 2.867.019.991,00 Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar

$$\frac{\text{Rp. 2.929.868.777,00}}{\text{Rp. 2.867.019.991,00}} \times 100\% = \mathbf{97,85\%}$$

3. Indeks Profesionalitas ASN

Nilai IP ASN Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 dengan target 77 terealisasi 77,99 sehingga diperoleh capaian kinerja 101%.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IP ASN yaitu dengan melakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Kecamatan Kutorejo melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek maupun Seminar dalam meningkatkan IP ASN Kecamatan Kutorejo

5. Kinerja Lainnya ke 4 yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan “

Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 3 inovasi dan terealisasi 3 inovasi.

Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Kutorejo dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :

1. “SIBAPERAN” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 26 tahun 2022 tentang Inovasi Sinau Bareng Masyarakat dan Perangkat Desa Se Kecamatan Kutorejo.
2. “SIASAT PANDU” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 189.1 tahun 2022 tentang Inovasi Penerapan Sosial Media Sebagai Alat Pengaduan Terpadu
3. “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Inovasi “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	106,29%	97,85%	8,44%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	99,73%	0,27%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	99,75%	0,25%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	99,82%	99,63%	0,19%
		3.2 Persentase Realisasi	103%	97,85%	5,15%

	yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Anggaran Perangkat Daerah			
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	101%	98,07%	2.93%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%	97,85%	2,15%

Untuk tahun 2023 penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo mencapai 97,85% yaitu dari total Anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.929.868.777,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.867.019.991,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 62.848.786,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

3.1.7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2023 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kutorejo semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2023.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Kutorejo mengelola anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp	2.862.407.777,00
- Belanja Pegawai	: Rp	2.162.787.000,00
- Belanja Barang dan jasa	: Rp	699.620.777,00
- Belanja Hibah	: Rp	0,00
Belanja Modal	: Rp	67.461.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp	64.671.000,00

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp 2.790.000,00

Jumlah Seluruh Anggaran Belanja : RP 2.929.868.777,00

Persentase anggaran pada masing–masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran per Program

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.314.500	22.255.000	97,65%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	260.593.600	259.934.600	99,87%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.646.960.677	2.584.830.391	99,75%
			2.929.868.777	2.867.019.991	97,85%

Sumber data LRA Kecamatan Kutorejo TA. 2023

❖ Pada Sasaran Strategis “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ ada 3 Program yang masuk kedalam sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 22.314.500,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 22.255.000,00 atau sebesar 99,73 %.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa , yang diampu oleh Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , kasi trantib dan Linmas serta Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 260.593.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 259.934.600,00 atau sebesar 99,87 %
Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.646.960.677,00 dan terealisasi Rp. 2.584.830.391,00 atau sebesar 99,75 %.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

3.3. TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 ada satu (satu) Sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan indikator kinerja IKM Kecamatan dan ada empat (empat) kinerja lainnya yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Ada 3 Indikator Kinerja yaitu :
 - 3.1. Nilai SAKIP Kecamatan
 - 3.2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 - 3.3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Kutorejo menjalankan 3 Program , 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.929.868.777,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.867.019.991,00 atau mencapai 97,85% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 85 terealisasi 90,35 sehingga capaian kinerjanya adalah 106,29%.

Pada kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Indikator Kinerja yang

pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 81 terealisasi 80,86 capaian kinerjanya adalah 99,82%, Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 95% terealisasi 97,85% capaian kinerjanya adalah 103%, Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 77 terealisasi 77,99 capaian kinerjanya adalah 101%.

Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, pada Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 3 inovasi terealisasi 3 inovasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta efisiensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV PENUTUP

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 dapat di samapaikan sebagai berikut :

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	90,35	106,29%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,86	99,82%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	97,85%	103%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	77	77,99	101%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

	Mempunyai Nilai Tambah				
--	---------------------------	--	--	--	--

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Kutorejo di Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan IP ASN. Diupayakan di Tahun depan Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang sinergi antara atasan dan bawahan , perencanaan yang baik serta komitmen Bersama agar target kinerja dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.



CAMAT KUTOREJO
NURYADI, SH., MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700820 199201 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

MATRIK RENJA PERUBAHAN HASIL REVIU TAHUN 2023

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTOREJO

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)			
							APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	Selisih	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,56	80,86 (A)	2.794.625.000	2.639.060.677	155.564.323	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	82%	82%	15.000.000	15.000.000	0	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	21 Laporan	7.060.000	7.060.000	0	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82%	82%	2.291.625.000	2.149.717.000	141.908.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	2.291.625.000	2.149.717.000	141.908.000	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	72	77	20.000.000	18.236.000	1.764.000	
7	1	1	2.05	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20.000.000	18.236.000	1.764.000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	239.000.000	223.346.027	15.653.973	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	10.000.000	9.995.000	5.000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	6 Paket	80.000.000	56.392.000	133.000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	35.643.500	4.356.500	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 Paket	15.000.000	12.769.027	2.230.973	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2.975.000	25.000	

						Undangan yang disediakan						
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 paket	40.000.000	40.000.000	0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	44.000.000	7.000.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	129.000.000	129.000.000	0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	39.600.000	39.600.000	0	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	24 laporan	89.400.000	89.400.000	0	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	82%	100.000.000	103.761.650	3.761.650	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	1 Unit	35.000.000	34.494.400	505.600	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3 unit	55.000.000	59.437.250	4.437.250	
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 unit	10.000.000	9.830.000	170.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	82%	30.000.000	22.314.500	7.685.500	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	605 pelayanan	30.000.000	22.314.500	7.685.500	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	30.000.000	22.314.500	7.685.500	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	299.800.000	260.593.600	39.206.400	

7	1	6	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 Fasilitasi	29 Fasilitasi	299.800.000	260.593.600	39.206.400
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	41.763.600	8.236.400
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	25.060.000	4.940.000
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	62.800.000	56.900.000	5.900.000
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	11 Dokumen	157.000.000,00	138.870.000,00	20.130.000
TOTAL									2.974.950.000	2.732.000.000	242.950.000

**MATRIK RENCANA KERJA DAN PENDANAAN P-RENJA 2023
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran		Selisih
			APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	
					2.974.950.000	2.732.000.000	242.950.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,56	80,86 (A)	2.794.625.000	2.639.060.677	155.564.323
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	82%	15.000.000	15.000.000	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	21 Laporan	7.060.000	7.060.000	0
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	82%	2.291.625.000	2.149.717.000	141.908.000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	2.291.625.000	2.149.717.000	141.908.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	72	77	20.000.000	18.236.000	1.764.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20.000.000	18.236.000	1.764.000

IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	82%	239.000.000	223.346.027	15.653.973
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	10.000.000	9.995.000	5.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	6 Paket	80.000.000	56.392.000	133.000
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	35.643.500	4.356.500
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 Paket	15.000.000	12.769.027	2.230.973
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2.975.000	25.000
10	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 paket	40.000.000	40.000.000	0
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	44.000.00	7.000.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	82%	129.000.000	129.000.000	0

13	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	39.600.000	39.600.000	0
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	24 laporan	89.400.000	89.400.000	0
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	82%	100.000.000	103.761.650	3.761.650
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	1 Unit	35.000.000	34.494.400	505.600
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3 unit	55.000.000	59.437.250	4.437.250
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 unit	10.000.000	9.830.000	170.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	82%	30.000.000	22.314.500	7.685.500
VIII	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	605 pelayanan	30.000.000	22.314.500	7.685.500
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	30.000.000	22.314.500	7.685.500

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	299.800.000	260.593.600	39.206.400
IX	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 Fasilitasi	29 Fasilitasi	299.800.000	260.593.600	39.206.400
19	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	41.763.600	8.236.400
20	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	25.060.000	4.940.000
21	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	62.800.000	56.900.000	5.900.000
22	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	11 Dokumen	157.000.000,00	138.870.000,00	20.130.000

MATRIK RENSTRA 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM	80	81	3.292.922.261	81,25	3.523.426.819	81,50	3.770.066.697	81,75	4.033.971.365	82	4.316.349.361	82	18.936.736.503	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan			Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	81,25	3.288.026.819	81,50	3.518.188.697	81,50	3.764.461.905	82	4.027.974.239	82	17.671.573.921	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	80	81	3.072.922.261	81,25	3.288.026.819	81,50	3.518.188.697	81,50	3.764.461.905	82	4.027.974.238	82	17.671.573.919	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	10 dokumen	13 dokumen	12.000.000	13 dokumen	12.840.000	13 dokumen	13.738.800	13 dokumen	14.700.516	13 dokumen	15.729.552	65 dokumen	69.008.868	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	10 dokumen	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	6.420.000	7 dokumen	6.869.400	7 dokumen	7.350.258	7 dokumen	7.864.776	35 dokumen	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	N/A	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	6.420.000	6 dokumen	6.869.400	6 dokumen	7.350.258	6 dokumen	7.864.776	30 dokumen	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	N/A	66 doku men	2.699. 922.2 61	66 doku men	2.888. 916.8 19	66 doku men	3.091. 140.9 97	66 doku men	3.307. 520.8 66	66 doku men	3.539. 047.3 27	330 doku men/ laporan	15.52 6.548. 270	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Doku men	2.676. 922.26 1	28 Doku men	2.864. 306.81 9	28 Doku men	3.064. 808.29 7	28 Doku men	3.279. 344.87 7	28 Doku men	3.508. 899.01 9	140 dokum en	15.394 .281.2 73	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	N/A	38 laporan	23.000 .000	38 laporan	24.610 .000	38 laporan	26.332 .700	38 laporan	28.175 .989	38 laporan	30.148 .308	190 laporan	132.26 6.997	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	N/A	27 stel	11.00 0.000	27 stel	11.77 0.000	27 stel	12.59 3.900	27 stel	13.47 5.473	27 stel	14.41 8.756	135 stel	63.25 8.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	N/A	27 stel	11.00 0.000	27 stel	11.77 0.000	27 stel	12.59 3.900	27 stel	13.47 5.473	27 stel	14.41 8.756	135 stel	63.25 8.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80	81	155.0 00.00 0	82	165.8 50.00 0	83	177.4 59.50 0	84	189.8 81.66 5	85	203.1 73.38 1	85	891.3 64.54 6	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	7.000. 000	1 paket	7.490. 000	1 paket	8.014. 300	1 paket	8.575. 301	1 paket	9.175. 572	5 paket	40.255 .173	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	80.000 .000	1 paket	85.600 .000	1 paket	91.592 .000	1 paket	98.003 .440	1 paket	104.86 3.681	5 paket	460.05 9.121	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	25.000 .000	12 bulan	26.750 .000	12 bulan	28.622 .500	12 bulan	30.626 .075	12 bulan	32.769 .900	60 bulan	143.76 8.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	2 paket	10.000 .000	2 paket	10.700 .000	2 paket	11.449 .000	2 paket	12.250 .430	2 paket	13.107 .960	10 paket	57.507 .390	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	N / A	1 paket	3.000. 000	1 paket	3.210. 000	1 paket	3.434. 700	1 paket	3.675. 129	1 paket	3.932. 388	5 paket	17.252 .217	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	1 paket	15.000 .000	1 paket	16.050 .000	1 paket	17.173 .500	1 paket	18.375 .645	1 paket	19.661 .940	5 paket	86.261 .085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo



		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	15.000 .000	12 bulan	16.050 .000	12 bulan	17.173 .500	12 bulan	18.375 .645	12 bulan	19.661 .940	60 bulan	86.261 .085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	80	81	121.0 22.40 0	81,25	129.4 93.96 8	81,50	138.5 58.54 6	81,75	148.2 57.64 4	82	158.6 35.67 9	82	695.9 68.23 6	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	36.000 .000	12 bulan	38.520 .000	12 bulan	41.216 .400	12 bulan	44.101 .548	12 bulan	47.188 .656	60 bulan	207.02 6.604	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	N / A	5 THL	85.022 .400	5 THL	90.973 .968	5 THL	97.342 .146	5 THL	104.15 6.096	5 THL	111.44 7.023	25 THL	488.94 1.632	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	80	81	73.97 7.600	81,25	79.15 6.032	81,50	84.69 6.954	81,75	90.62 5.741	82	96.96 9.543	82	425.4 25.87 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	2 unit	30.000 .000	2 unit	32.100 .000	2 unit	34.347 .000	2 unit	36.751 .290	2 unit	39.323 .880	10 unit	172.52 2.170	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	35.977 .600	3 unit	38.496 .032	3 unit	41.190 .754	3 unit	44.074 .107	3 unit	47.159 .295	15 unit	206.89 7.788	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	8.000. 000	1 paket	8.560. 000	1 paket	9.159. 200	1 paket	9.800. 344	1 paket	10.486 .368	5 paket	46.005 .912	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

			Bangunan Lainnya																
	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	7.01.0 2		IKM Kecamatan	81	81	220.0 00.00 0	81,25	235.4 00.00 0	81,50	251.8 78.00 0	81,75	269.5 09.46 0	82	288.3 75.12 2	82	1.265. 162.5 82	Kec. Kutorejo Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo Kec. Kutorejo
		7.01.0 2.2.04 .01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81	81	20.00 0.000	81,25	21.40 0.000	81,50	22.89 8.000	81,75	24.50 0.860	82	26.21 5.920	82	115.0 14.78 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	605 pelaya nan	20.00 0.000	605 pelaya nan	21.40 0.000	605 pelaya nan	22.89 8.000	605 pelaya nan	24.50 0.860	605 pelaya nan	26.21 5.920	4.025 pelaya nan	115.0 14.78 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutor ejo
		7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	N / A	5 pelaya nan	5.000. 000	5 pelaya nan	5.350. 000	5 pelaya nan	5.724. 500	5 pelaya nan	6.125. 215	5 pelaya nan	6.553. 980	25 pelaya nan	28.753 .695	Kec. Kutorejo	Kec. Kutore jo
		7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	600 pelaya nan	15.000 .000	600 pelaya nan	16.050 .000	600 pelaya nan	17.173 .500	600 pelaya nan	18.375 .645	600 pelaya nan	19.661 .940	3.000 pelaya nan	86.261 .085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutore jo
		7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat	81	81	200.0 00.00 0	81,25	214.0 00.00 0	81,50	228.9 80.00 0	81,75	245.0 08.60 0	82	262.1 59.20 2	82	1.150. 147.8 02	Kec. Kutorejo	Kec. Kutor ejo
		7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,	81	17 fasilit asi	200.0 00.00 0	17 fasilit asi	214.0 00.00 0	17 fasilit asi	228.9 80.00 0	17 fasilit asi	245.0 08.60 0	17 fasilit asi	262.1 59.20 2	85 fasilit asi	1.150. 147.8 02	Kec. Kutorejo	Kec. Kutor ejo

				kesejahteraan masyarakat															
		7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 jenis	17 fasilitas	40.000 .000	17 fasilitas	42.800 .000	17 fasilitas	45.796 .000	17 fasilitas	49.001 .720	17 fasilitas	52.431 .840	85 fasilitas	230.02 9.560	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 jenis	17 fasilitas	25.000 .000	17 fasilitas	26.750 .000	17 fasilitas	28.622 .500	17 fasilitas	30.626 .075	17 fasilitas	32.769 .900	85 fasilitas	143.76 8.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 6.2.01. 11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 jenis	17 fasilitas	35.000 .000	17 fasilitas	37.450 .000	17 fasilitas	40.071 .500	17 fasilitas	42.876 .505	17 fasilitas	45.877 .860	85 fasilitas	201.27 5.865	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 6.2.01. 12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 jenis	17 fasilitas	100.00 0.000	17 fasilitas	107.00 0000	17 fasilitas	114.49 0.000	17 fasilitas	122.50 4.300	17 fasilitas	131.07 9.601	85 fasilitas	575.07 3.901	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

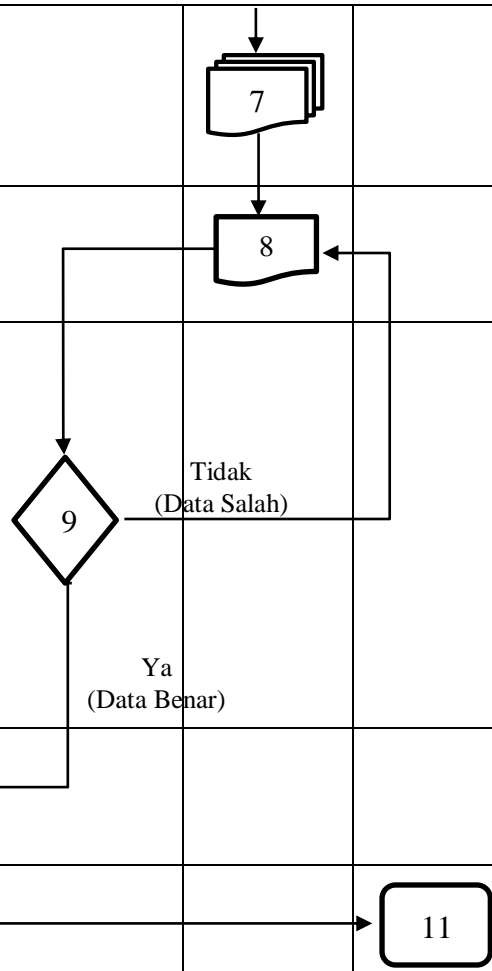
	Nomor SOP	065/ 520 /416-307/2023
	Tgl Pembuatan	14 September 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	14 September 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KUTOREJO Jl. Mayjen H. Soemadi No. 108 Telp. (0321) 511127 KUTOREJO	Disahkan oleh	 Camat Kutorejo <u>NURYADI, SH., MM</u> Pembina Tk. I NIP. 19700820 199201 1 002
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	PENGUKURAN DATA KINERJA


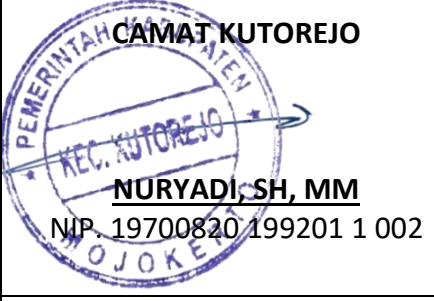
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur data realisasi capaian indicator kinerja pada jenjang Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu target penetapan kinerja.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pengumpulan Data Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kinerja Renstra Renja LKjIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Apabila SOP Pengukuran Data Kinerja Tidak Diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja

URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekretaris Camat	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Camat memerintahkan Sekretaris Camat dan Kasubag Sungram dan Keuangan Untuk Melakukan pengukran data kinerja	1				Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
2.	Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukran data kinerja		2			Nota Dinas	60 Menit	Notulen Rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukran kinereja			3		Notulen Rapat	120 Menit	Notulen Rapat	
4.	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indicator kinerja			4		1. Renja 2. Perjanjian Kinerja 3. IKU 4. IKI	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
5.	Seluruh ASN Internal melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan		5			Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
6.	Tim SAKIP melakukan evaluasi capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan			6		Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	

7.	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap program, kegiatan dan sub kegiatan				Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
8.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat				Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	60 Menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
9.	Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi. Jika terdapat kesalahan data maka dikembalikan ke tim untuk dilakukan perbaikan / dilengkapi sesuai arahan				Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	120 menit	Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10.	Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat				Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 Menit	Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
11.	Pengarsipan Data Kinerja				Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			



	Nomor SOP	065/ 5 /416-307/2022
	Tgl Pembuatan	1 Juni 2017
	Tgl Revisi 1	6 Januari 2022
	Tgl Revisi 1	12 Januari 2023
	Tgl Efektif	17 Januari 2023
<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KUTOREJO Jl. Mayjen H. Soemadi No. 108 Telp. (0321) 511127 KUTOREJO</p>	Disahkan oleh	
<p align="center">SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN</p>	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto; 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai teknis penyusunan LKjIP Memiliki pemahaman tentang sistematika dan teknis penyusunan LKjIP Memiliki pemahaman tentang RPJMD, LKPJ, RKPD dan Perda APBD Memahami Laporan Realisasi Anggaran Program Memiliki pemahaman tentang RPJMD dan Perda APBD
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja SOP Pengumpulan Data 	<ol style="list-style-type: none"> ATK Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan LKjIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Data dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Kasubag Perencanaan	Sekcam	Camat	Tim	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permintaan Penyusunan LKJIP dari Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto, mencatat pada agenda surat masuk, memberikan lembar disposisi dan menyampaikan surat kepada Sekcam					1	Surat, buku agenda, lembar disposisi	15 menit	Surat dicatat pada agenda surat	
2.	Meneruskan surat kepada camat untuk mendapatkan disposisi surat		2				Surat	30 menit	Disposisi surat dari pimpinan	
3.	Menerima disposisi surat dan memerintahkan kepada Sub bagian perencanaan untuk diproses lebih lanjut		3				Surat	15 menit	Disposisi surat	
4.	Membuat perencanaan kerja penyusunan LKJIP dan melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan untuk menyusun LkjIP	4					Rencana Kerja, Form isian data, Aturan terkait	1 Minggu	Data LKJIP	
5.	Mengadakan rapat pembahasan draft penyusunan LKJIP dengan Tim				5		Rencana Kerja, Form isian data, Aturan terkait	1 hari	Data LKJIP	
6.	Memproses hasil pembahasan draft penyusunan LKJIP, melakukan koreksi dan persetujuan draft	6					Data LKJIP	2 Minggu	Draft awal LKJIP	
7.	Menyampaikan Dokumen LKJIP kepada Camat untuk dimintakan tanda tangan			7			Draft awal LKJIP	30 menit	Draft LKJIP disetujui menjadi dokumen	
8.	Mengirimkan dokumen LKJIP ke Bagian Organisasi					1	Dokumen LKJIP	1 hari	Dokumen LKJIP yang terkirim	

CASCADING KECAMATAN KUTOREJO 2023																				KEPALA DAERAH																										
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																																														
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																																														
TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal																				CAMAT / ESELON III																										
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan																																														
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah										SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal										CAMAT / ESELON III																										
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi										IKM Pelayanan Kecamatan																																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																				CAMAT / ESELON III																										
Nilai SAKIP Perangkat Daerah																																														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		ESELON III																								
Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana sesuai target		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan bahan Logistik Kantor		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Penyediaan Bahan/Material		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pengadaan Mebel		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat		ESELON IV
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Mebel		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		Jumlah Dokumen yang Dilibasiti dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desadengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat		



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

Nomor : 705/2163/416-060/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/1817/416-060/2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/2027/416-060/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP **80,86** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
- a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

			Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	26,04
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,08
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,45
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,29
Jumlah	100,00	80,86

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Kutorejo telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) , Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen tersebut telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu pada

halaman *website* SI-SAKIP dan *Equivalent Series Resistance* (ESR) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada saat evaluasi halaman *website* Kecamatan Kutorejo dapat diakses sehingga evaluator dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan telah dipublikasikan melalui halaman *website* Kecamatan Kutorejo. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain yaitu :

- 1) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto telah menyusun *cascading* dan pohon kinerja. Namun belum adanya *crosscutting* sebagai perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- 2) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Namun monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga tidak ada *reward and punishment* bila capaian target tidak tercapai dan membuat langkah perbaikan yang dilakukan ke depannya.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,08** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah secara berkala secara triwulanan atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja organisasi maupun individu telah dilakukan melalui aplikasi yaitu Suhita untuk kinerja individu, dengan aplikasi tersebut pengukuran kinerja dapat dilakukan secara berkala dan secara berjenjang. Aplikasi tersebut juga memungkinkan pimpinan organisasi untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja telah disusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja, dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *namun* belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)

jika terjadi kesalahan data dalam pengumpulan data kinerja, hal ini berpotensi menyebabkan tidak ada pedoman yang jelas untuk melakukan perbaikan data sehingga perbaikan data tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,45** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKjIP Tahun 2022 telah dipublikasikan melalui *website* Si-SAKIP dan ESR Menpan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain yaitu :

- 1) Adanya saran yang diberikan demi tercapainya sasaran, program / kegiatan pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan perbaikan di tahun yang akan datang belum menggambarkan secara keseluruhan hambatan/permasalahan yang dihadapi.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Namun pada laporan belum seluruhnya tertuang pada realisasi kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal mencakup pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022 serta capaian output dan outcome organisasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **16,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output dan peningkatan kinerja (*outcome*) atas kinerja Perangkat Daerah, hal ini ditunjukkan dengan masih sebagian kecil capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Tim AKIP Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
- a. Menyusun *crosscutting* dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar Perangkat Daerah atau instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan lebih menjelaskan keterkaitan indikator kinerja.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja serta selalu memantau capaian kinerja secara berkala. Sehingga *reward and punishment* capaian target dapat tercapai dan membuat langkah perbaikan yang dilakukan ke depannya dalam bentuk laporan dan terdokumentasi.
 - c. Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data.
 - d. Melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :
 - 1) Memberikan saran atas keseluruhan hambatan/permasalahan yang dihadapi demi tercapainya sasaran, program / kegiatan pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan perbaikan di tahun yang akan datang.
 - 2) Membuat Dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah telah tertuang pada realisasi kinerja seluruhnya.
 - e. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output dan peningkatan kinerja (*outcome*) kinerja Perangkat Daerah.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mojokerto, 30 Agustus 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KUTOREJO

JL. Mayjen H. Soemadi No. 108 Kutorejo – Mojokerto, Jawa Timur, Pos. 61383
Telp. (0321) 511127 - e-mail : kecamatan.kutorejo@gmail.com
Website : <http://kutorejo.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 19 September 2023

Nomor : 705/ 523 /416-307/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Evaluasi AKIP TA. 2023

K e p a d a
Yth. Inspektur Kabupaten Mojokerto
Di-
M O J O K E R T O

Menindaklanjuti Surat Inspektorat tanggal 31 Agustus 2023 nomor : 705/2219/416-060/2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil tindak Lanjut AKIP Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan rencana tindak lanjut AKIP sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.


CAMAT KUTOREJO
NURYADI, SH., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19700820 199201 1 002

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Rekomendasi Terselesaikan
1.	Menyusun Croscutting dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar Perangkat Daerah atau instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan lebih menjelaskan keterkaitan indikator kinerja.	Mengidentifikasi hubungan antar perangkat daerah atau lintas fungsi yang mempengaruhi kinerja kecamatan Kutorejo	Oktober 2023
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi rencana aksi kinerja serta selalu memantau capaian kinerja secara berkala. Sehingga reward and punishment capaian target dapat tercapai dan membuat langkah perbaikan yang dilakukan ke depannya dalam bentuk laporan dan terdokumentasi.	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut dan pemantauannya serta mengidentifikasi kemungkinan hambatan berikut strategi selanjutnya	Oktober 2023
3.	Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data jika terjadi kesalahan data	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan evaluasi SOP Pengukuran Data Kinerja dan mempertimbangkan faktor kesalahan data kinerja . - Menyusun revisi SOP Pengukuran data Kinerja yang mempertimbangkan factor kesalahan data kinerja. 	Oktober 2023
4.	Melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 1. Memberikan saran atas keseluruhan hambatan/permasalahan yang dihadapi demi tercapainya sasaran, program / kegiatan pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan perbaikan di tahun yang akan datang	Kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan kami sesuaikan dengan Permenpan Nomor 53 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan akan dilakukan reviu internal dalam penyusunan LKjIP demi tercapainya sasaran, program dan kegiatan	Januari – Pebruari 2024

	2. Membuat dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah telah tertuang pada realisasi kinerja seluruhnya.	Data pembandingan realisasi kinerja dengan target dan capaian kinerja tahun sebelumnya akan ditambahkan pada Laporan LKjIP bab III.	
5.	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output dan peningkatan kinerja (outcome) kinerja Perangkat daerah	Kedepan Kecamatan Kutorejo akan memanfaatkan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dimanfaatkan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan capaian output dan outcome kinerja Perangkat Daerah.	Nopember 2023

CAMAT KUTOREJO



NURYADI, SH., MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19700820 199201 1 002

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU REKOMENDASI TERSELESAIKAN
a.	Menyusun Crosscutting dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar Perangkat Daerah atau Instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan lebih menjelaskan keterkaitan indikator kinerja.	https://drive.google.com/file/d/1TGLfj1kOZA_5YISYfxh-8KnXYB16OxId/view?usp=sharing	Terselesaikan
b.	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja serta selalu memantau capaian target dapat tercapai dan membuat langkah perbaikan yang dilakukan ke depannya dalam bentuk laporan dan terdokumentasi.	https://drive.google.com/file/d/14WZk2zMwwlHw8hq4AKwV-1FrZ6w9qIFd/view?usp=sharing	Terselesaikan
c.	Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data.	https://drive.google.com/file/d/1S9-niPYXY_jLgMOhj0l6PIQbpLADPQ88/view?usp=sharing	Terselesaikan
d.	Melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :		
	1. Memberikan saran atas keseluruhan hambatan/permasalahan yang dihadapi demi tercapainya sasaran, program / Kegiatan pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan Perbaikan di Tahun yang akan datang.	https://drive.google.com/file/d/1Zouor_4u9kCvxRijOnfuVzdvoGt6aKEo/view?usp=sharing	Terselesaikan
	2. Membuat Dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah telah tertuang pada realisasi kinerja seluruhnya.	https://drive.google.com/file/d/1D30FakgEF6AnCjKgpMRHNvQ-gsyULFQd/view?usp=sharing	Terselesaikan
e.	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output dan peningkatan kinerja (outcome) kinerja Perangkat Daerah	https://drive.google.com/file/d/1MSZIWDDA1FQKutBR2HqqWVU6lIT8aaT6/view?usp=sharing	Terselesaikan



CAMAT KUTOREJO
NURYADI, SH., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19700820 199201 1 002